




## ARTICLE

# Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019

Mahadiansar Mahadiansar <sup>1</sup>, Ramadhani Setiawan <sup>2</sup>, Eki Darmawan <sup>3</sup>, Fitri Kurnianingsih <sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Brawijaya

Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

<sup>2,3,4</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang

✉ [mahadiansar@student.ub.ac.id](mailto:mahadiansar@student.ub.ac.id)

 OPEN ACCESS

Citation: Mahadiansar, M., Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Matra Pembaruan*. 5(1), 65-75

Received: February 23, 2021

Accepted: March 19, 2021

Published: May 31, 2021

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

**Keywords:** *Development, Foreign Direct Investment, Indonesia*

**Kata Kunci:**

Pengembangan, Investasi Asing Langsung, Indonesia

**Abstract:** *Foreign direct investment in Indonesia has a very significant impact on the progress of a developing country to improve the welfare of the people. This research focuses on the conditions that occur in foreign direct investment in Indonesia in 2019 with various existing problems. The method used was by reviewing studies advanced in literature. The results show that there needs to be an independent body that controls or supervises the course of foreign direct investment, especially in areas that have the potential to invest, a very strong alternative in this paper needs to involve local governments in special economic zones (KEK) so that foreign direct investment can be felt in the region which has the potential to be empowered both in the use of natural and human resources.*

**Abstrak:** Keberadaan investasi asing langsung di Indonesia sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan sebuah negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kondisi yang terjadi pada investasi asing langsung di Indonesia pada tahun 2019 dengan berbagai macam problematika yang ada. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan kajian literatur dari berbagai data sekunder yang dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya badan independent yang mengontrol atau mengawasi jalannya investasi asing langsung khususnya dikawasan yang memiliki potensi untuk berinvestasi, alternatif yang sangat kuat dalam tulisan ini perlu melibatkan pemerintah daerah dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar investasi asing langsung bisa dirasakan di kawasan yang berpotensi bisa diberdayakan baik pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

## I. Pendahuluan

Investasi merupakan variabel yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu wilayah, baik itu dalam lingkup daerah maupun negara. Suatu negara yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi salah satunya karena ditunjang besarnya aliran investasi ke negara yang bersangkutan (Sulistiawati 2012). Dalam hal ini keterlibatan dunia usaha (sektor swasta) tidak lagi bersifat komplementer dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah, namun saat ini peranan sektor swasta menjadi sangat penting dan strategis. Pengalaman pemerintah Indonesia pada periode 1970-an, menunjukkan bahwa dengan ketersediaan dana dari pendapatan ekspor minyak dan gas dalam jumlah besar memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan berdasarkan buku yang berjudul “Aspek fiskal bisnis hulu migas, 2017”.

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Investasi Asing Langsung yang biasa dikenal dengan Foreign Direct Investment (FDI) dibagi menjadi tiga yaitu Portofolio, *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *Credit Ekspor*. *Foreign Direct Investment* (FDI) melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan sehingga dinamika usaha yang menyangkut tujuan perusahaan tidak lepas dari pihak yang berkepentingan / investor asing (Ambarsari & Purnomo 2005). Portofolio merupakan investasi keuangan yang dilakukan luar negeri dengan cara investor membeli utang atau sekuritas dengan harapan mendapat manfaat financial dari investasi tersebut. *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat diartikan sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain.

*Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi yang mengglobal. Hal ini dianggap lebih berguna bagi negara dibandingkan investasi pada ekuitas perusahaan karena investasi ekuitas berpotensi terjadinya *capital outflow* sebab investasi ekuitas ini lebih bersifat jangka pendek dan sewaktu-waktu dapat ditarik secara tiba-tiba dan menimbulkan kerentanan ekonomi.

Pada periode tersebut pemerintah dapat berperan sebagai *engine of growth* (motor penggerak perekonomian). Pembangunan di berbagai sektor dapat dibiayai oleh investasi pemerintah. Namun saat ini, kondisi sudah sangat jauh berbeda; pemerintah tidak bisa lagi berperan sebagai *engine of growth* sendiri, melainkan sangat membutuhkan keterlibatan dari setiap sektor; baik itu sektor masyarakat terlebih dari lagi dari swasta (Mahadiansar et al. 2020). Pemerintah di berbagai level baik pusat maupun daerah menghadapi kendala anggaran untuk secara mandiri menggerakkan perekonomian. Dengan kata lain, keterlibatan dunia swasta dan masyarakat secara aktif merupakan suatu keniscayaan dari sebuah pengharapan, sehingga antara pemerintah, swasta, dan masyarakat berada dibarisan yang sama dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.

Pemerintah pada berbagai level juga dapat dipastikan juga tidak akan sanggup menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapinya dalam beberapa dekade ini, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur dasar, penguatan sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan lain sebagainya, jika hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah semata maka tidak akan pernah ada percepatan atas penanggulangan terhadap persoalan-persoalan hajat hidup kebutuhan dasar rakyat (Febriana, A., Muqorobbin 2014), Maka oleh untuk itu dibutuhkan keterlibatan sumber anggran non-pemerintah dari investasi sektor swasta dan peran aktif oleh masyarakat (Alfiandri & Mahadiansar 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang Persyaratan Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan (selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah No.83/2001), kepemilikan Penanaman Modal Asing (PMA), tidak seluruhnya dikuasai oleh pihak asing. Dalam porsi yang cukup, kepemilikan diwajibkan juga untuk warga negara Indonesia atau BUMN. Melalui Penanaman Modal Asing (PMA), modal kerja dapat diperoleh terutama untuk sektor-sektor industri padat modal, dan juga Penanaman Modal Asing (PMA), sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha domestik kelas menengah.

Negara turut menikmati manfaat Penanaman Modal Asing (PMA) melalui setoran pajaknya, baik itu dari pajak perusahaan maupun pajak pekerja asing. Secara politis, pemerintah negara asal Penanaman Modal Asing (PMA) umumnya lebih “lunak” pada pemerintah RI karena ada kepentingan pengusahnya di Indonesia. Dapat diharapkan terjadinya alih-teknologi.

**Tabel 1.** 10 Negara Terbesar Investasi Asing Langsung Indonesia Pada Tahun 2019

Negara	Jumlah
Singapore	US\$ 3,4 Miliar
Japan	US\$ 2,3 Miliar
China	US\$ 2,3 Miliar
Hongkong	US\$ 1,3 Miliar
Malaysia	US\$ 1 Miliar
Netherland	US\$ 738 Juta
USA	US\$ 631,7 Juta
South Korea	US\$ 544,4 juta
Virgin Islands	US\$ 385,4 juta
Thailand	262,2 juta

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2019

Pentingnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan sebagai bentuk penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. Pemerintah juga melalui BKPM berkoordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kemudian koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia serta pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal (BKPM, 2019). Melakukan Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi Foreign Direct Investment (FDI) sepanjang 2019 sebesar Rp 423,1 triliun. Nilai ini meleset dari target tahun lalu yakni hanya mencapai 87,5% dari Rp 483,7 triliun. Selama 2019, Singapura masih menjadi negara asal investasi terbesar di Indonesia. Negeri Singa tersebut tercatat menanam dananya sebesar US\$ 6,5 miliar atau 23,1% dari keseluruhan investasi. Selanjutnya, Tiongkok sebesar US\$ 4,7 miliar atau mencapai 16,8%, Jepang US\$ 4,3 miliar atau 15,3%, Hong Kong US\$ 2,9 miliar atau 10,2%, dan Belanda US\$ 2,6 miliar sebesar 9,2%.

Berdasarkan Pertumbuhan Investasi asing langsung Foreign Direct Investment (FDI) 10 Tahun Terakhir ke Indonesia meningkat 6,4 persen tahun-ke-tahun menjadi Rp105,3 triliun, atau USD7 miliar, pada kuartal keempat 2019, menyusul lonjakan 17,8 persen pada periode tiga bulan sebelumnya. China, Hong Kong dan Singapura adalah sumber utama investasi, sementara sektor logam dasar, utilitas dan pertambangan adalah penerima manfaat terbesar. Untuk keseluruhan 2019, ada Rp 423,1 triliun Foreign Direct Investment (FDI) ke negara itu, setara dengan USD 28,2 miliar, atau 87,5 persen dari target setahun penuh. Singapura dan Cina adalah sumber Foreign Direct Investment (FDI) terbesar, dengan utilitas, pergudangan, transportasi, komunikasi dan logam dasar menerima jumlah terbesar. Target Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk tahun 2020 adalah untuk menarik investasi sebesar Rp 886 triliun, sekitar 55 persen di antaranya akan berasal dari perusahaan asing.

**Gambar 1.** Pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) 10 Tahun Terakhir



Sumber : tradingeconomic.com | Investment Coordinating Board of The Republic of Indonesia

Di beberapa negara aliran modal asing dari Jepang ke Rusia dan menggambarkan pencapaian dan masalah investor Jepang terkait dengan bisnis dengan Rusia sehingga pasar Rusia tampaknya menjadi pilihan yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan Jepang, meskipun terbatas pada kebebasan institusi untuk melakukan pendatang dan kondisi investasi yang tidak menguntungkan, termasuk kendala bahasa karena penggunaan yang luas dari Rusia di bidang bisnis - faktor-faktor yang telah tercermin dalam transaksi yang lebih tinggi biaya (Tokunaga & Sukanuma 2020). Kemudian di Vietnam, berkat integrasi yang lebih dalam ke dalam ekonomi global, Vietnam telah menarik sejumlah besar FDI yang merupakan pendorong penting bagi pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari semua 63 provinsi di Vietnam pada periode 2011-15 dan teknik efek tetap dengan kesalahan standar yang kuat (Nguyen et al. 2020).

Berdasarkan temuannya menunjukkan efek buruk FDI pada permintaan untuk pekerjaan agregat dan tenaga kerja terampil yang ada di Vietnam. Menariknya besarnya absolut efek pada pekerjaan tenaga kerja terampil jauh lebih besar dari pada pekerjaan agregat. Selain itu, efeknya positif di sektor jasa dan industri meskipun dalam hal besarnya, efek di kedua secara signifikan lebih rendah dari pada di yang sebelumnya terhadap efeknya negatif di sektor pertanian. Meningkatnya skala ekspor-impor meningkatkan efek negatif FDI pada permintaan tenaga kerja terampil (UNCTAD 2007).

FDI sangat memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian dunia, hal ini terjadi pada periode 1977-2010 menyelidiki faktor-faktor utama yang menentukan aliran masuk investasi asing langsung (FDI) ke negara-negara berkembang cepat seperti Brasil, Cina, India, Rusia, Afrika Selatan dan Malaysia (Ho et al. 2013). Temuan mereka adalah fundamental ekonomi makro dan spesifik negara memberikan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi, konsumsi pemerintah, dan keterbukaan perdagangan sangat penting bagi FDI, sukses Cina dalam menyesuaikan kondisi untuk investasi asing langsung, Vietnam dan, pada tingkat yang lebih rendah, Malaysia berada di depan kebanyakan negara Asia lainnya karena selalu menganut strategi pertumbuhan berorientasi ekspor, tetapi Indonesia tidak dapat menanggapi secara tepat waktu terhadap lanskap ekonomi yang berubah.

Selain itu, kualitas infrastruktur khusus negara dan kebebasan ekonomi juga merupakan faktor penting dalam menentukan FDI serta memiliki implikasi kebijakan yang signifikan untuk pertumbuhan dan perkembangan terutama melalui investasi langsung asing.

## I.A. Konsep Investasi Asing Langsung

*Foreign Direct Investment* (FDI) adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri (Krugman 2000). *Foreign Direct Investment* (FDI) bagian dari dukungan jangka panjang oleh suatu negara pada negara lain dalam bidang manajemen, perusahaan patungan, transfer teknologi, dan konsultasi pakar. Jenis investasi asing langsung yaitu investasi asing langsung ke

dalam, investasi asing langsung ke luar, dan persediaan investasi asing langsung

Penanaman modal langsung untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non migas yang berdaya saing di tingkat internasional. *Foreign direct investment* tidak hanya mencakup transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi kepemilikan asing, melainkan juga mekanisme yang memungkinkan investor asing untuk mempelajari manajemen dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam *corporate governance mechanism*.

Selanjutnya aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki beberapa keuntungan, yaitu Aliran modal tersebut mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan deversifikasi melalui investasi; Integrasi global pasar modal dapat memberikan *spread* terbaik dalam pembentukan *corporate governance, accounting rules*, dan legalitas; dan Mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah (Feldstein 2000). *Foreign direct investment* (FDI) terdiri dari *inward* dan *outward*. *Inward foreign direct investment* adalah investasi dari mancanegara ke dalam negeri, sedangkan *outward foreign direct investment* merupakan investasi ke negara lain. *Foreign direct investment* (FDI) bermula saat sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (*home country*) bisa mempengaruhi perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (*host country*) baik sebagian atau seluruhnya (Sentanu 2015).

Negara penerima (*host country*) *Foreign Direct Investment* (FDI) akan menerima keuntungan antara lain adanya dalih teknologi dalam bentuk varietas baru dari capital inputs yang tidak dapat dicapai melalui investasi keuangan (*financial investment*) atau perdagangan barang dan jasa. *Foreign Direct Investment* (FDI) juga dapat mempromosikan kompetisi pada pasar domestik (*domestic output market*). Penerima *Foreign Direct Investment* (FDI) memberikan pelatihan bagi karyawan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia di *host country*, Laba yang dihasilkan oleh *Foreign Direct Investment* (FDI) juga memberikan kontribusi terhadap pajak pendapatan (Razin et al. 2002).

Tiga kondisi perusahaan ingin melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI) antara lain Perusahaan harus memiliki keunggulan kepemilikan dibanding perusahaan lain; Keputusan *Foreign Direct Investment* (FDI) tersebut harus lebih menguntungkan dari pada menjual atau menyewakan dan Keputusan *Foreign Direct Investment* (FDI) harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input yang ada beralokasi di luar negeri (Sarwedi 2002).

Secara singkat, kebutuhan yang paling utama dari *Foreign Direct Investment* (FDI) di beberapa negara berkembang yaitu Terbangunnya infrastruktur yang memadai dan akses bahan baku yang ada; Hubungan komunikasi antar pemangku kepentingan dan jalur transportasi; Keterampilan dan biaya upah buruh yang berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. *Foreign Direct Investment* (FDI) mempunyai pengaruh positif terhadap upah tenaga kerja pada industri-industri penerima (*receipt industry*) (Yudhartha 2017; Yunas 2019).

*Foreign Direct Investment* (FDI) dapat berbentuk penyertaan modal secara langsung, teknologi dan keterampilan manajerial atau secara tidak langsung melalui efek *spillover* (penyebaran) pengetahuan pada perusahaan lokal (Pettinger 2019). Kawasan ASEAN dalam *Foreign Direct Investment* (FDI) perkembangan menyatakan bahwa motif yang mendasari kegiatan penanaman modal asing adalah motif *strategis*, motif perilaku dan motif ekonomi. Beberapa hal yang termasuk ke dalam motif *strategis* adalah usaha mencari pasar, mencari pengetahuan dan mencari keamanan politik (Yeung 1994; Yee et al. 2010).

## I.B. Kajian Terdahulu Investasi Asing Langsung

Masalah ekonomi global yang terjadi mempengaruhi perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia menurun dan pertumbuhannya menjadi lambat. Kemudian faktor domestik dan global tidak stabil yang mempengaruhi penurunan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia (Astuty 2017). Kemudian *Foreign Direct*

*Investment* (FDI) dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka menyarankan pemerintah dapat memprioritaskan anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan ketersediaannya infrastruktur dapat menarik minat dalam berinvestasi (Putri et al. 2018).

Berbeda dengan (Sari & Baskara 2018) menyatakan perlu ada pengembangan kebijakan-kebijakan terkait *Foreign Direct Investment* (FDI) sehingga dapat memberi manfaat untuk pembangunan ekonomi di Indonesia yang merata kedepannya. Memberikan kemudahan-kemudahan investasi yang tentunya berdampak pada masyarakat lokal, baik terkait lapangan pekerjaan, transfer ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat menguntungkan semua pihak. Hasil temuan dari (Mainita & Soleh 2019) bahwa peningkatan investasi cukup tinggi terhadap pertumbuhan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia dan menunjukkan bahwa variabel nilai tukar, peranan perdagangan internasional dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia. Lalu (Mutiara et al. 2018) pada implementasi layanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh BKPM terkait dengan kegiatan *Investment* adalah salah satu upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sangat menarik, terutama dalam mengatasi faktor penghambat kegiatan *Foreign Direct Investment* (FDI).

Realisasi *Foreign Direct Investment* (FDI) pada tahun 2019 memiliki sebanyak 23 bidang *Foreign Direct Investment* (FDI) yang di minati para investor, padahal berangkat dari sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusianya (SDM), di Indonesia sangat kental akan potensi SDM dan SDA. Seharusnya perlu evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang mengakibatkan kesenjangan *Foreign Direct Investment* (FDI). Demikian peran pemerintah pusat dalam menjalankan hak dan wewenangnya untuk mengelola *Foreign Direct Investment* (FDI).

## II. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan melakukan telaah terhadap sumber-sumber pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya baik cetak maupun *online* yang relevan dengan topik yang sedang dikaji pada penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Galvan & Galvan 2017; Zed 2014).

Menurut (Bogdan & Biklen 1998) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Kemudian membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci (Surakhmad 1980). Selanjutnya (Yin 2010) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya.

Menurut (Ary et al. 1985) studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji organisasi atau individu secara mendalam. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berasal dari berbagai macam jurnal bereputasi, buku-buku yang berhubungan dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) dimana data sekunder tersebut dianalisis secara mendalam.

## III. Hasil Dan Pembahasan

### III.A. Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia

Beberapa hal yang termasuk ke dalam motif perilaku adalah rangsangan bagi lingkungan eksternal yang berdasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu, sedangkan yang termasuk ke dalam motif ekonomi adalah usaha mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga saham perusahaan. Motif-motif lain untuk menggunakan *Foreign Direct Investment* (FDI) biasanya terkait dengan

efisiensi biaya, seperti menggunakan faktor-faktor produksi asing, bahan baku atau teknologi. Selain terlibat dalam perusahaan multinasional, *Foreign Direct Investment* (FDI) dipakai untuk melindungi market share luar negeri, untuk bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar, atau untuk menghindari hambatan perdagangan.

Data BKPM laporan realisasi investasi tahun 2018, tren *Foreign Direct Investment* (FDI) pada sektor manufaktur justru menurun dalam lima tahun terakhir. Tahun 2014, nilai *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor manufaktur sebesar US\$ 13 miliar. Nilai PMA kemudian turun menjadi US\$ 11,8 miliar pada 2015. Pada tahun 2016, nilai *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor manufaktur sempat meningkat menjadi US\$ 16,7 miliar. Namun, nilai tersebut kembali terus menurun yaitu menjadi masing-masing US\$ 13,1 miliar pada 2017 dan US\$ 10,4 miliar pada tahun 2018. Data BKPM pada tahun 2019, nilai *Foreign Direct Investment* (FDI) ke sektor manufaktur sepanjang Januari-September 2019 baru mencapai US\$ 6,3 miliar.

Porsi investasi di sektor manufaktur tergerus menjadi hanya 29,7% dari total *Foreign Direct Investment* (FDI), jauh di bawah porsi sektor jasa yaitu 59,1%. Berdasarkan data dan fakta yang telah dijelaskan maka perlunya peran pemerintah dalam melakukan terhadap fokus dan nilai dari sebuah program yang perlu di evaluasi. namun (Alfiandri & Mahadiansar, 2020) dalam menentukan evaluasi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi namun tujuan dan sasaran kebijakan *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan berbagai permasalahan yang nantinya akan berdampak di lingkungan para investor dengan adanya data penurunan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia.

### III.B. Prioritas Investasi Asing Langsung di Indonesia

Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) menyebut ada empat sektor yang bisa menjadi andalan Pemerintahan saat ini dalam lima tahun ke depan untuk membangun iklim investasi. Empat sektor yang bisa menjadi andalan investasi yaitu pertanian, kemaritiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini di sampaikan Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta menjelaskan “Pemerintah harus fokus menggarap sektor hilirisasi pertanian termasuk di bidang kehutanan. Kedua, fokus menggarap maritim termasuk perikanan. Ketiga, bidang pariwisata dan terakhir investasi di bidang ekonomi kreatif,” (CNN.Indonesia).

Pemerintahan ke depan memfokuskan pengembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) di empat sektor itu, akan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam Indonesia dan menciptakan lapangan kerja yang sangat terbuka. “Kalau kita bicara pertanian, ekonomi kreatif, maritim, pariwisata, itu semua adalah ekonomi kerakyatan, dan itu semuanya ekonomi sehari-hari yang dikerjakan rakyat Indonesia,” (CNN.Indonesia).

Pemerintah juga perlu melakukan investasi untuk pengembangan industri, di antaranya investasi petrokimia dan logam dasar. Selain itu pemerintah juga dinilai perlu berinvestasi di bidang industri teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Industri ini masuk dalam tiga besar impor dalam neraca perdagangan di luar migas dan pangan.

### III.C. Hambatan Investasi Asing Langsung Di Indonesia

Menurut (Meilana, (2019) berpendapat pemerintah berencana membuat omnibus law, yaitu menyederhanakan undang-undang (UU) yang terkait proses perizinan untuk mempercepat investasi. DPR perlu mendorong pemerintah untuk merevisi UU yang dianggap menghambat investasi, menyederhanakan regulasi untuk memangkas birokrasi perijinan, dan menjaga stabilitas politik untuk meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia. Berdasarkan data yang telah ditelusuri oleh tim peneliti untuk di analisis evaluasi kebijakannya, berikut beberapa hambatan investasi asing langsung di Indonesia yang dapat di pertimbangkan yaitu :

#### a. Investasi Asing Langsung Masih Terpusat di Pulau Jawa

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2019 melaporkan sebaran lima lokasi *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Jika diakumulasikan, alokasi investasi terbesar terdapat di Jawa Barat sebesar 17,4%

atau sebesar Rp 68,7 triliun. Investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 20,4 triliun dan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebesar Rp 48,2 triliun. Sebaran selanjutnya terdapat di DKI Jakarta sebesar 13,8% atau Rp 54,5 triliun, terdiri atas investasi PMDN sebesar Rp 26,6 triliun dan PMA sebesar Rp 27,8 triliun. Di posisi berikutnya ada Jawa Tengah (9,1%) dan Jawa Timur (8,1%) dengan nilai total investasi PMDN dan *Foreign Direct Investment* (FDI) masing-masing sebesar Rp 36,2 triliun dan Rp 32 triliun.

Para investor saat ini tidak hanya fokus untuk menanamkan dananya di Pulau Jawa. Hal ini tercermin dari sebaran investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 434,6 triliun dengan porsi 53,7%, sementara di luar Pulau Jawa sebesar Rp 375 triliun atau memiliki andil 46,3%. Pemerataan investasi terjadi lantaran pemerintah telah mengembangkan infrastruktur di berbagai daerah.

Sementara itu, nilai investasi di Banten sebesar 6,2% atau Rp 24,6 triliun. Sasaran lokasi investasi sepanjang Januari-Juni atau semester I-2019 masih didominasi Pulau Jawa. Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 218,1 triliun atau memegang porsi 55,1%. Sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 177,5 triliun atau memegang porsi 44,9%.

Maka dari pada itu dapat disimpulkan bahwa perlu ada *evaluasi the adversary model* dengan mengevaluasi kembali terhadap program *Foreign Direct Investment* (FDI) agar adanya pemerataan yang signifikan terhadap penyebaran *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia agar program yang dilaksanakan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, selain program *Foreign Direct Investment* (FDI) harus diawasi jika pemerataan *Foreign Direct Investment* (FDI) sudah dilaksanakan agar bisa dinilai kembali oleh publik.

#### b. Adanya Ketidaksesuaian Hukum Ketenagakerjaan

Pemerintah diminta dapat merevisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Langkah ini untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan atau *labour law* di Indonesia kurang kompetitif oleh sejumlah investor. Membuat para investor kurang tertarik melakukan *foreign direct investment* (FDI) di Indonesia. Hal ini di sampaikan oleh Direktur PT Ashmore Asset Management Indonesia, Arief Cahyadi Wana “Salah satu yang *critical* itu *labor law*. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah bagaimana *reform* peraturan yang ada, supaya FDI masuk. Kami pernah mencoba melakukan survei dengan beberapa perusahaan. Hambatan yang paling besar untuk masuk ke Indonesia jawabannya adalah *labour law*,” (Kompas.com).

Selama ini investor asing banyak berinvestasi pada instrumen-instrumen jasa keuangan, semisal obligasi atau di pasar modal. Terlihat dari derasnya arus masuk (*inflow*) ke pasar obligasi sebesar Rp 107 triliun dan Rp 12 triliun-Rp 13 triliun pada saham. Seharusnya pemerintah dapat memperbaiki aturan tersebut, sehingga akan lebih banyak *Foreign Direct Investment* (FDI) yang datang. Salah satunya perbaikannya dengan melakukan studi banding dengan hukum ketenagakerjaan di luar negeri.

“Pemerintah bisa lakukan studi banding antara *labour law* Indonesia dengan produktivitasnya, ada juga salah satunya faktor kompensasi untuk bekerja. Intinya bagaimana membuat FDI nyaman juga kompetitif misal di Vietnam kenapa lebih banyak FDI ke sana,” (Kompas.com).

Kemudian Praktisi Kehukuman Ketenagakerjaan Linna Simamora menambahkan pembaruan UU Ketenagakerjaan diperlukan apabila pemerintah ingin mengembalikan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Saat ini, kata Linna, UU Ketenagakerjaan terdapat beberapa hal penting yang kurang fleksibel bagi para investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

“Misalnya isu mengenai proses pemutusan hubungan kerja yang mensyaratkan pemberian surat peringatan satu, dua dan tiga sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dirasa kurang fleksibel dan berbelit-belit. Dibutuhkan suatu evaluasi kebijakan yang tepat untuk mengatur mengenai kenaikan UMR sehingga kenaikan tersebut bisa tepat dan terukur,” (Kompas.com).

Selama ini UU Ketenagakerjaan membatasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan



dengan menggunakan skema kontrak atau yang dikenal dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Selain dari jenis pekerjaannya, masa kerja suatu PKWT juga diberlakukan batas maksimum dan tanpa masa percobaan. Kemudian, permasalahan mengenai kenaikan UMR di Indonesia juga dirasakan oleh Linna sebagai permasalahan yang belum ditangani secara memadai.

Sesuai dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan ketidakpastian akan UU tenagakerjaan masuk pada evaluasi yudisial terhadap kepastian hukum ketika suatu program maupun produk hukum lainnya dalam mengundang *Foreign Direct Investment* (FDI) yang nantinya berdampak para investor yang seharusnya mendapatkan kemudahan akan mengalami kesulitan dalam mengikuti siklus *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia.

### c. Perlunya Regulasi Percepatan akibat hambatan investasi

Pada saat ini sejumlah kementerian tengah merevisi aturan terkait percepatan investasi di Tanah Air. Sejumlah Peraturan Menteri (Permen) tengah digodok ulang untuk mendukung percepatan pelaksanaan berusaha. Menurut catatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kini pemerintah tengah merevisi 16 Permen. Targetnya revisi Permen ini akan terbit akhir tahun ini. Selain itu, pemerintah tengah mereview 11 Permen yang terbit setelah terbitnya Inpres No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, serta 97 Larangan Terbatas untuk memperbaiki kinerja ekspor impor.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemdag), Karyanto Suprih menyatakan saat ini pihaknya tengah mereview dan menginventaris sejumlah aturan sesuai dengan kebutuhan percepatan investasi saat ini. Terakrit hal tersebut Kemdag masih membahas di level Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Investasi. "Jika dipandang perlu direvisi, bahkan perlu dicabut, nanti dibawa ke Satgas Nasional untuk dibahas dan diputuskan, Prinsipnya semua (aturan) direview, tapi saat ini kami fokus pada regulasi yang terkait pendelegasian wewenang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar menarik bagi investor. Saat ini kami juga sedang inventarisir beberapa peirizinan yang akan didelegasikan wewenang ke BKPM"(bkpm.go.id).

KEK menjadi instrumen yang semakin populer untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembuat kebijakan di negara berkembang menerapkan berbagai bentuk KEK untuk mengatalisasi pertumbuhan, termasuk menarik Foreign Direct Investment. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Bahkan data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan.

Maka berdasarkan pernyataan di atas bahwsanya perlunya evaluasi dampak terhadap regulasi tersebut maka implementasi kebijakan *Foreign Direct Investment* (FDI) tentang regulasi dalam percepatan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia. Dengan adanya wacaana tentang satgas percepatan ininvestasi hal ini trebukti dengan pendapat (Myers, 1979) yaitu dengan di hadirnya unit pengujian seperti badan pegawai yang bersifat independen sebagai bentuk alternatif pasca evaluasi kebijakan telah di lakukan oleh pemerintah.

Keberadaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai membawa berkah tersendiri karena dengan payung Omnibus Law Cipta Kerja, para investor asing lebih mudah mendapatkan izin apabila akan membangun perusahaan di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, lanjut dia, juga

terdapat berbagai klaster yang berkaitan dengan penyederhanaan perizinan. Berisi juga persyaratan investasi, ketenagakerjaan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Termasuk dengan Investasi dan Proyek Pemerintah dan Kawasan Ekonomi khusus (KEK). Hadirnya kewenangan dan aturan nantinya tentang merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan potensi wilayah yang memberikan kontribusi dalam pemanfaatan SDM dan SDA di seluruh kawasan di Indonesia akan memberikan dampak yang signifikan maksimal terhadap perekonomian daerah dalam rangka membangunkan pembangunan daerah dari segala sektor demi yang berkelanjutan.

Selama ini banyak investor yang merasa kesulitan saat ingin memproses perizinan dan investasi, karena proses perizinan usaha yang berbelit. Ditambah lagi adanya ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah.

#### IV. Kesimpulan

Keuntungan seharusnya dalam *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dimanfaatkannya sebaik-baiknya bagi Indonesia yaitu dengan jumlah penduduk lebih dari 267 juta orang merupakan suatu pasar potensial dan sumber tenaga kerja yang kompetitif, kemudian lokasi Indonesia pada Asia Tenggara yang strategis menghubungkan beberapa rute pelayaran internasional yang vital serta ekonomi terbuka berorientasi pasar dengan rezim pertukaran valuta asing yang bebas. Menjawab dari rumusan penelitian *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia.

Perlunya peran pemerintah pusat dan daerah maupun sektor swasta (*Collaborative Government*) dalam membuat regulasi aturan yang sangat mudah (*one way*) dengan memperhatikan dampak yang akan terjadi serta hak dan wewenang dengan menghadirkan *win-win solution* setelah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan yang nantinya di lakukan evaluasi program tentang *Foreign Direct Investment* (FDI) sudah terlaksana tersebut sebagai upaya percepatan dalam pertumbuhan sehingga mengangkat perekonomian bagi masyarakat yang termajinalkan oleh perkembangan zaman dari waktu ke waktu.

Evaluasi kebijakan terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia memiliki alternatif yang harus di lakukan pemerintah setelah evaluasi maupun sebelum evaluasi yaitu perlu di ajukannya oleh pemerintah pusat setelah melakukan evaluasi akan membentuk satgas percepatan investasi. Artinya pemerintah membuat seperti badan pelaksana. Munculnya alternatif yaitu wacana pembentukan dan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah berjalan dalam penguatan regulasi yang merupakan percepatan investasi yang menyerahkan hak dan wewenang terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ada.

#### Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih kami ucapkan kepada para Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji telah memberikan berupa program isentif publikasi karya ilmiah tahun anggaran 2021-2022. Tak lupa terima kasih kami untuk tim editor dan tim reviewer Matra Pembaharuan : Jurnal Inovasi Kebijakan, jurnal kemendagri yang telah bekerja dengan menerbitkan tulisan ini dengan sempurna serta pihak-pihak yang lainnya terlibat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Alfiandri, Alfiandri & Mahadiansar, Mahadiansar. (2020). «Dampak perubahan free trade zone menjadi special economic zone di Kota Batam». *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 04 (02): 292–307. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/1945>.
- Ambarsari, Indah & Purnomo, Didit. (2005). «Studi tentang penanaman modal asing di Indonesia». *Jurnal ekonomi Pembangunan* 6 (1): 26–47. <https://doi.org/10.23917/jep.v6i1.4006>
- Ary, Donald; Jacobs, Lucy Cheser & Razavieh, Asghar. (1985). *Introduction to research in education*. 3. arg. New York: Holt, Rinehart, and Winston. <https://www.modares.ac.ir/uploads/Agr.Oth.Lib.12.pdf>
- Astuty, Fuji. (2017). «Analisis investasi asing langsung dan faktor faktor yang mempengaruhinya di Indonesia». *Jurnal Mutiara Akuntansi* 2 (2): 48–62. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1070858&val=16077&title=ANALISIS%20INVESTASI%20ASING%20LANGSUNG%20>

- DAN%20FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHINYADI%20INDONESIA  
 Badan Koordinasi Penanaman Modal | BKPM Republik Indonesia. (2019). «Realisasi FDI Kuartal IV 2019». Bogdan, Robert C. & Biklen, Sari Knopp. (1998). *Quality research for education: An introduction to theory and methods*. 3. arg. Boston: Allyn and Bacon.
- Febriana, A., Muqorobbin, M. (2014). «Investasi asing langsung di Indonesia dan faktor faktor yang mempengaruhinya». *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 2 (2): 79803. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1221>
- Feldstein, Martin. (2000). «Aspects of global economic intergration: Outlook for the future». NBER Working Paper (National Bureau of Economic Research). Libk. 7899. Cambridge. [https://www.nber.org/system/files/working\\_papers/w7899/w7899.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7899/w7899.pdf)
- Galvan, Jose L & Galvan, Melisa C. (2017). *Writing literatur reviews : A guide for student of the social and behavior sciences*. 7th arg. California: Routledge.
- Ho, Catherina S.F.; Ahmad, Nortiyati & Dahan, Hayati Mohd. (2013). «Economic freedom, macroeconomic fundamentals and foreign direct investment in fast emerging brics and Malaysia». *International Journal of Banking and Finance* 10 (1): 4. <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijbf/article/view/8467>
- Krugman, Paul. (2000). «Fire sale foreign direct investment» in Edwards, Sebastian (arg.). *Capital Flows and the Emerging Economies: Theory, Evidence, and Controversies*, 43–60. Chicago: University of Chicago Press. <https://www.nber.org/system/files/chapters/c6164/c6164.pdf>
- Mahadiansar, M et al. (2020). «Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia». *Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 17 (1): 77–92. <http://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Mainita & Soleh, Ahmad. (2019). «Analisis investasi asing langsung di indonesia». *Jurnal Development* 7 (2): 86–97. <http://jurnal.umjambi.ac.id/index.php/JD/article/view/139>
- Mutiara, Yunial Laily et al. (2018). «Peran badan koordinasi penanaman modal dalam memfasilitasi kegiatan investasi asing langsung terhadap perusahaan di indonesia». *Nurani* 18 (2): 215–226. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2740>
- Nguyen, Thai Quang et al. (2020). «Impacts of foreign direct investment inflows on employment in Vietnam». *Institutions and Economics* 12 (1): 37–62. <https://ijie.um.edu.my/article/view/22022>
- Pettinger, Tejvan. (2019). «Factors that affect foreign direct investment». *Economics : Help To Simplify Economics*. <https://www.economicshelp.org/blog/15736/economics/factors-that-affect-foreign-direct-investment-fdi/>.
- Putri, Riris Prantika; Heriberta & Emilia. (2018). «Pengaruh inflasi, investasi asing langsung dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia». *Jurnal Paradigma Ekonomika* 13 (2): 95–104. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6625>
- Razin, Assaf; Sadka, Efraim & Swagel, Phillip. (2002). «The aging population and the size of the welfare state». *Journal of Political Economy* 110 (4) (abuztuak): 900–918. <https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1086%2F340780;h=repec:ucp:jpolec:v:110:y:2002:i:4:p:900-918>
- Sari, Gusti Agung Ayu Ratih Melta & Baskara, I Gde Kajeng. (2018). «Pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap investasi asing langsung di indonesia». *E-Jurnal Manajemen Unud* 7 (7): 4002–4030. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i07.p20>
- Sarwedi. (2002). «Investasi asing langsung di indonesia dan faktor yang mempengaruhinya». *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4 (1): 17–35. <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15688>
- Sentanu, I Gede Eko Putra Sri. (2015). «Increasing trust in local government financial management and building integrity: efforts reform in Indonesia». *Public Policy and Administration Research* 5 (3): 206–213. <https://core.ac.uk/download/pdf/234669635.pdf>
- Sulistiawati, R. (2012). «Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi di Indonesia». *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 3 (1): 29–50. <https://www.neliti.com/id/publications/10500/pengaruh-investasi-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-dan-penyerapan-tenaga-kerja-sert>
- Surakhmad, Winarno. (1980). *Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik*. Bandung: Tarsito.
- Tokunaga, Masahiro & Sukanuma, Keiko. (2020). «Japan's foreign direct investment in Russia: A big return from a small opportunity». *Eurasian Geography and Economics* 00 (00): 1–26. <http://dx.doi.org/10.1080/015387216.2020.1716820>
- UNCTAD. (2007). «FDI in Tourism : The Development Dimension». *United Nations Conference On Trade And Development*. Swiss. [https://unctad.org/en/Docs/iteia20075\\_en.pdf](https://unctad.org/en/Docs/iteia20075_en.pdf)
- Yee, Rachel W.Y.; Yeung, Andy C.L. & Edwin Cheng, T. C. (2010). «An empirical study of employee loyalty, service quality and firm performance in the service industry». *International Journal of Production Economics* 124 (1): 109–120. [https://www.academia.edu/26496047/An\\_empirical\\_study\\_of\\_employee\\_loyalty\\_service\\_quality\\_and\\_firm\\_performance\\_in\\_the\\_service\\_industry](https://www.academia.edu/26496047/An_empirical_study_of_employee_loyalty_service_quality_and_firm_performance_in_the_service_industry)
- Yeung, W-C H. (1994). «Hong Kong firms in the ASEAN region : transnational corporations and foreign direct investment». *Environment and Planning* 26: 1931–1956. <https://doi.org/10.1068%2Fa261931>
- Yin, Robert K. (2010). *Qualitative research from start to finish*. New York: Guilford Press.
- Yudhartha, I Putu Dharmanu. (2017). «Alternatif kebijakan pertanian dalam menghadapi otonomi desa di Kabupaten Tabanan». *Matra Pembaruan* 1 (2) (uztailak 25): 65–74. doi:10.21787/mp.1.2.2017.65-74. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/408>.
- Yunas, Novy Setia. (2019). «Implementasi konsep penta helix dalam pengembangan potensi desa melalui model lumbung ekonomi desa di provinsi jawa timur». *Matra Pembaharuan; Jurnal Inovasi Kebijakan* 3 (1): 37–46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Zed, Mestika. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. 3. arg. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.